

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis dapat mencapai kesimpulan berikut dari diskusi bab sebelumnya tentang analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat:

1. Membuat dan merencanakan pengolahan keuangan, yang mencakup kebijakan yang berlangsung dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini akan memastikan dan meningkatkan kualitas pengolahan keuangan yang baik.
2. Penyusunan anggaran adalah proses jangka pendek untuk membuat rencana kerja, yaitu menentukan berapa banyak uang yang akan diberikan dan apa yang akan dilakukan untuk setiap program dalam satuan moneter. Anggaran harus disusun dengan cara yang meminimalkan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, dan mempertahankan rasa keadilan dan kepatuhan yang diperlukan oleh fungsi pembagian dan distribusi anggaran daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu dinas kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran. Laporan ini harus dilengkapi dengan analisis perbandingan antara pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi kesalahan dan alasan di balik kesalahan tersebut.
4. Anggaran BPS Provinsi Sumatera Barat dimulai dengan RKA di tingkat subdirektorat, bagian, bidang, atau fungsional. Kemudian, RKA ini diajukan kepada direktur, kepala biro, inspektur, atau kepala pusat. Setelah RKA disetujui oleh Sestama, Irtama, atau Deputi, RKA dikirim ke Biro Perencanaan BPS untuk dikompilasi dan dievaluasi kemudian dibuat menjadi Draft Rancangan Kerja BPS. Setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPS, Rancangan Kerja BPS diajukan ke Kementerian Keuangan melalui beberapa tahap, biasanya di bulan Juli, Pagu Anggaran RKA BPS di bulan Agustus, dan Alokasi Anggaran RKA BPS di bulan September.
5. Pada tahun anggaran 2020, anggaran belanja BPS Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi sebesar 92,52% dari yang direncanakan, dengan realisasi belanja pegawai sebesar 93,42% dari yang direncanakan, belanja barang sebesar 90,56% dari yang direncanakan, dan belanja modal sebesar 98,59% dari yang direncanakan. Persentase di atas menunjukkan bahwa program dan

kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan untuk tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan dengan baik dan efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penyerapan dana anggaran lebih dari 90%.

6. Pada tahun anggaran 2021, anggaran belanja BPS Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi sebesar 97,62% dari yang direncanakan, dengan realisasi belanja pegawai sebesar 98,35% dari yang direncanakan, belanja barang sebesar 96,63% dari yang direncanakan, dan belanja modal sebesar 99,48% dari yang direncanakan. Realisasi belanja TA 2021 meningkat sebesar 5,1% dibandingkan dengan TA 2020. Ini disebabkan oleh belanja barang dan modal untuk penanganan COVID-19 dan kegiatan karena penambahan peralatan mesin dan peralatan penanganan COVID-19, kenaikan pangkat pegawai dan peralihan jabatan.

7. Pada tahun anggaran 2022, anggaran belanja BPS Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi sebesar 96,30% dari yang direncanakan, dengan realisasi belanja pegawai sebesar 98,35% dari yang direncanakan, belanja barang sebesar 98,92% dari yang direncanakan, dan belanja modal sebesar 97,99% dari yang direncanakan. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,32% dibandingkan dengan TA 2020. Ini disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan karena diangkatnya dan pemindahan karyawan, peningkatan belanja barang karena pembelian persediaan untuk kegiatan, dan penurunan belanja modal karena pengadaan hanya alat uji.

8. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase rasio antara anggaran dan realisasi total belanja sebesar 92,52% pada tahun 2020, naik sebesar 97,62% pada tahun 2021, dan turun sebesar 96,30% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan bahwa penyerapan dana anggaran dan belanja pada tahun anggaran 2020–2022 telah terlaksana dan efektif, meskipun ada perubahan atau penurunan.

5.2 Saran

Organisasi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja pekerja dan memberikan data yang akurat dan tepat kepada pengguna informasi. Ini adalah upaya penulis untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang diharapkan dapat bermanfaat di masa mendatang. Diharapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dapat memaksimalkan dan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk menjadi lebih baik dan efektif ke depan. Ini akan memungkinkan mereka menghasilkan data yang lebih baik dan dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dengan cara yang tepat.